

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA KALIMO'OK KEC. KALIANGET KAB. SUMENEP)

T E S I S

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister*

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI



Diajukan Oleh :

ASTRI FURQANI
0962020029

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
SURABAYA
2010**

T E S I S

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA KALIMO'OK KEC. KALIANGET KAB. SUMENEP)

Yang disusun oleh :

ASTRI FURQANI
NPM : 0962020029

Telah Dipertahankan Di Depan Dosen Penguji
Pada Tanggal 05 Januari 2011
Dan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Anggota Dewan Penguji

Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si

Prof. Dr. H. Djohan Mashudi, SE. M.Si

Pembimbing Pendamping

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM.Ak

Drs. Ec. Munari, MM

Dra. Ec. Siti Sundari, M.Si

Surabaya, 05 Januari 2011
UPN "Veteran" Jawa Timur
Program Pasca Sarjana
Direktur,

Prof. Dr. H. Djohan Mashudi, SE. M.Si



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA KALIMO’OK KEC. KALIANGET KAB. SUMENEP)”**.

Peneliti menyusun tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan program studi Magister Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Peneliti menyadari bahwa dealam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan guna perbaikan penelitian selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Djohan Mashudi, SE, MS. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si. selaku Pembimbing I dan Drs. Ec. Munari, MM. Selaku Pembimbing II.
5. Seluruh dosen dan Staf Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Kepala Desa Kalimo’ok beserta perangkatnya, juga kepada Ketua BPD atas bantuan dan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini.
7. Suamiku tercinta, Fatah Firdaus, atas dukungan dan bantuannya yang tak terhingga bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk kedua orang tuaku atas Do’a dan kasih sayangnya selama ini.
9. Rekan rekan mahasiswa akuntansi angkatan X atas kerjasama dan supportnya bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal sampai akhir penelitian ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam membangun keilmuan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surabaya, Desember 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7

BAB II: KAJIAN TEORI DAN EMPIRIK

2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Pengertian <i>Good Governance</i>	14
2.3. Pengertian Responsibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas..	18
2.4. Pengertian Desa.....	21
2.5. Keuangan desa.....	26

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian	33
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Sumber Data.....	34
3.4. Pengumpulan Data.....	35
3.5. Analisis Data	38

3.6. Instrumen Penelitian.....	38
3.7. Keabsahan Data.....	39
3.8. Das Sollen dan Das Sein.....	39
BAB IV: DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa.....	46
BAB V. PEMBAHASAN	
5.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	59
5.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	63
5.3. Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	67
5.4. Implikasi Hasil Penelitian.....	75
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	81
6.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA KALIMO'OK KEC. KALIANGET KAB. SUMENEP)

Disusun Oleh :

Astri Furgani, SE

ABSTRACT

In Permendagri No. 37/2007 on Guidelines for village financial management that village financial management is the overall activities including planning, budgeting, administration, reporting, accountability and financial control village. Also mentioned village finances are managed based on the principles of transparent, accountable, participatory and performed with an orderly and disciplined budget.

The purpose of this research is to investigate the application of transparency, accountability, and responsibility in financial management of the villages Kalimo'ok in the sub-district Kalianget district Sumenep. From the results of research on the Financial management of the Village Kalimo'ok sub-district Kalianget district Sumenep, transparency occurs only when the planning alone. Almost all of the process does not satisfy the principle of responsibility because there are some things in the process that does not comply with Permendagri No. 37/2007. While accountability is very low because because the responsibility does not involve the community and BPD (Badan Permusyawaratan Desa/ Village Consultative Bodies).

From the research results recommended that each village financial management process carried out in accordance with Permendagri No. 37/2007 which meet the principles of transparency, accountability and responsibility. Also required the active involvement of village communities and the need for socialization Kalimo'ok back and technical training on financial management of the village to the Government of the Village and BPD.

Keywords: Permendagri, transparency, accountability, responsibility, finance.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Sebagaimana tercantum dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society*, paling tidak dapat merasukkan banyak hal, merasukkan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan, dan itulah yang disebut *good governance*, sehingga dengan semua metodologi sistem pengelolaan ekonomi keuangan di desa dapat bergulir melalui *policy statenya*, melalui skenarionya sampai membangun suatu mekanisme pembangunan yang berorientasi pada desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 37/2007 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat.

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal kegiatan pembangunan fisik. Akan tetapi kadangkala pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas kurang dll), bahkan ada yang sama sekali tidak/ belum dilaksanakan.

Sebenarnya, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa tidak akan terjadi apabila ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Namun, yang terjadi memang

masih sangat susah dalam melibatkan peran aktif masyarakat, sebab ternyata dari hasil belajar bersama dengan masyarakat, mereka tidak terlibat aktif memang karena tidak pernah diajak (<http://kaumbiasa.com/otonomi-desa.php>).

Gambaran diatas sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri No. 37/2007 dalam pasal II yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam kaitan ini maka responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Menurut IRE Yogyakarta ([http:// www.ireyogya.org /ire.php? about = booklet-15.htm](http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.htm)), *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa meliputi :

- Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
- APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
- Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat memberi dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan desa secara lebih baik agar di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pematapan demokrasi, kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional Indonesia (Reformasi Birokrasi).

Desa Kalimo'ok di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, juga mempunyai gambaran yang hampir sama dengan gambaran diatas dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa secara transparan, akuntabel, responsibilitas sehingga terwujud *Good Governance*.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti berniat untuk mengambil judul penelitian ” **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kab. Sumenep).**”

2. Perumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumenep, khususnya Pemerintahan Desa Kalimo'ok dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Sebagai Bahan Referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan penelitian dalam kajian Pengelolaan Keuangan Desa..